



Islam Dan Negara: Dinamika Perkembangan Pascapenjajahan Serta Tantangan Dan Hambatan Demokrasi Di Dunia

^{1*}Aldi Wijaya Dalimunthe, ²Siti Aisyah Br Rambe, ³Zaini Dahlan

^{1,2,3}Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{1*}aldiwijaya182@gmail.com, ²abiphrayasyah@gmail.com, ³zainidahlan@uinsu.ac.id

Info Artikel

Masuk:

25 Des 2023

Diterima:

30 Des 2023

Diterbitkan:

04 Jan 2024

Kata Kunci:

Sejarah,
Negara,
Islam,
Demokrasi,
Hambatan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah perkembangan Negara Islam setelah imperialisme dan untuk mengungkap beberapa kerangka pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan mayoritas yang saat ini mengalami kesulitan dan hambatan. Strategi dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi penelitian dari kekayaan seni dan melibatkan jagad teks sebagai bahan dasar kajiannya. Dengan menggunakan buku-buku tentang sejarah dan demokrasi, sumber-sumber relevan lainnya juga dapat mendukung dan menyempurnakan data yang dibutuhkan. Konsekuensi dari kajian ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah penataan negara-negara Islam pasca imperialisme dilihat dari beberapa unsur, yaitu faktor kebijaksanaan, khususnya kelompok masyarakat Islam yang bekerjasama dan mengambil bagian dalam pembelajaran militer dan pendidikan dengan penjajah dan penjajah. komponen pejuang, khususnya kelompok masyarakat Muslim yang memerangi para pelanggar untuk mengambil kendali atas kebebasan negara mereka. Kesulitan dan penghalang terhadap pemerintahan mayoritas adalah bahwa polisi tiran pada umumnya bersifat patriot dan konservatif, kerangka wirausaha yang digambarkan oleh kemajuan modern dan sektor bisnis terbuka tidak dapat dijalankan dengan baik di distrik Timur Tengah, kehadiran tradisional Perkumpulan Islam, gagasan perkumpulan fanatik.

PENDAHULUAN

Negara-negara Islam yang tercipta saat ini tentunya mempunyai suka dan duka tersendiri dalam mencapai kemajuan dalam pemerintahannya baik dari segi struktur pemerintahan yang dijalankannya maupun beberapa bidang yang diciptakan dalam negara tersebut, hal ini merupakan salah satu akibat dari perjuangan individu-individu di masa lalu. dalam berjuang demi negara. terlebih lagi negara mereka penjajahan oleh bangsa yang berbeda. Segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu termasuk manusia merupakan sejarah yang mempunyai kedudukan penting dalam ingatan manusia. Legenda dari Indonesia mengatakan "Jas Merah" yang mengandung arti selalu mengingat sejarah. Beberapa kerangka pemerintahan yang dijalankan oleh negara Islam pasca imperialisme masih dijalankan dan dikembangkan hingga saat ini, hal ini menjadi sebuah pembenaran bagi para pengganti negara Islam untuk melihat nilai sejarah sehingga dapat menumbuhkan apa yang sudah besar dari masa yang lalu.

Setelah runtuhnya wilayah Ottoman, beberapa negara Islam bangkit dari keterpurukan ekspansionisme dengan membentuk negara-negara Islam dengan kerangka berbasis suara yang bertekad untuk membuat individu mempunyai kekuasaan penuh atas negara tersebut. Peningkatan kemajuan umat Islam yang terus berlanjut memberikan hal-hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari partisipasi hingga ketergantungan pada berbagai keyakinan Islam yang ada saat ini.

Dalam kemerdekaan bangsa-bangsa islam, tak sedikit bangsa-bangsa islam yang telah merdeka menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi mempunyai pengaruh terhadap pemikiran dan perilaku setiap masyarakat. Hal ini mengakibatkan penerapan demokrasi memiliki karakteristik dan praktik yang berbeda-beda di setiap negara. Agama merupakan faktor penting dalam menentukan lanskap politik, karena nilai-nilai agama merupakan kekuatan yang kuat dalam politik Indonesia. Dengan demikian, agama dapat memberikan pengaruh terhadap dinamika dan cita rasa demokrasi di Indonesia. (Richard, 2004).

Dikotomi antara Islam dan demokrasi semakin tegang. Hal ini merupakan akibat dari ajaran Islam tentang ibadah, akhlak, dan bahaya kesalahan manusia. Sebaliknya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menggunakan mekanisme interaksi antar masyarakat dan memanfaatkan sitasi-sitasi yang terburu-buru. (Ali, 2016)

Setiap negara berdaulat berupaya mencapai stabilitas politik melalui pemerintah yang dimenai oleh rakyat dan menjalankan conik. Pengakuan belaka terhadap adanya isu penting terkait tata kelola, yaitu pemerintahan, mungkin tidak membantu dalam menentukan apakah suatu negara demokratis atau tidak. (Ali, 2016)

Seiring dengan mencapai kehidupan terjaga, sejumlah besar individu yang fana tidak tunduk pada demokrasi. Sebagai pemerintahan yang berjalan di Indonesia tetap dengan sistem demokrasi. Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut, karena alasan inilah. Penulis merasa tertarik untuk menulis tentang "Hambatan dan Tantangan Demokrasi di Dunia Islam" sehubungan dengan hal ini. Penulis berharap, setelah mengetahui sistem demokrasi di Indonesia, pembaca dapat membicarakan oleh penilajaran mereka. (Abdul, n.d)

METODE

Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode tinjauan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan pemecahan masalah yang mencakup teknik analisis. Metode penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menjadikan dunia teks sebagai bahan utama analisis dan mencoba mengumpulkan data penelitian dari khazanah sastra (Sugiyono, 2019). Sumber terkait lainnya juga dapat menegakkan dan menyempurnakan informasi yang diharapkan. Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber berbeda: sumber primer dan sekunder. Hotspot penting untuk eksplorasi ini memanfaatkan buku-buku tentang Sejarah

Sementara itu, sumber pendukung menggunakan buku dan catatan harian yang mengkaji Sejarah dan sistem aturan mayoritas. Pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan strategi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan informasi dengan cara meneliti informasi laporan, khususnya sebagai sumber informasi dari beberapa karya tulis yang relevan dengan subjek pemeriksaan. Dokumentasi disini dapat berupa buku, catatan harian, makalah, majalah, atau web yang digunakan untuk ujian ini. Rekaman juga bisa berupa gambar, komposisi, atau karya fantastis seseorang, misalnya jurnal, narasi kehidupan, kisah, pedoman, atau aransemen. (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tumbuhnya Negara dan Bangsa Islam Pascapenjajahan

Pada dasarnya, tidak ada negara yang dengan sengaja melakukan penjajahan. Karena mendirikan koloni adalah tindakan ilegal, suatu negara selalu memaksakan kolonialisme pada negara lain. Negara-negara terjajah pada umumnya mengalami keterpurukan dalam segala urusan sehari-hari. Akibatnya, negara-negara Muslim yang terjajah melakukan perlawanan terhadap negara-negara provinsi dan berusaha melepaskan diri dari kendali dan pelecehan mereka. Durasi kolonialisme bervariasi antar negara Muslim; berlangsung dari waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, hingga ratusan tahun. Panjangnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh banyak variabel yang juga bergeser dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. (Asari, 2019) Sejumlah negara Islam mencapai kemerdekaan yang sebagian besar terjadi sekitar pertengahan abad ke-20. Meskipun demikian, terdapat juga berbagai perbedaan antara Islam dan negara-negara Eropa yang menyadarkan umat Islam bahwa mereka pasti jauh tertinggal dari Eropa. Yang pertama merasakan hal ini adalah bangsa Turki Ottoman. Karena masalah kepentingan yang dihadapi Eropa membatasi para penguasa dan pahlawan Turki untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna dari Eropa. Negara-negara yang baru merdeka menjelang akhir tahun ke-20, khususnya negara-negara yang menjadi otonom dari Asosiasi Soviet. Dalam kasus-kasus yang lebih parah lagi, ada juga pertemuan-pertemuan Muslim yang sampai saat ini belum menjadi otonom, sama seperti yang terjadi pada Muslim Palestina dan Rohingya. Jika diperhatikan, diplomasi dan perang adalah dua cara yang digunakan negara-negara Muslim mengatasi kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan. Setiap negara memanfaatkan keduanya dalam berbagai tingkatan. Ada orang yang lebih memanfaatkan keleluasaan dalam siklus kebebasan. Ada juga yang menyertakan lebih banyak pertarungan.

Menurut L Stoddard, Al Afghani dalam tulisan ilmiah Kurniawan (Kurniawan dkk, 2022), merupakan orang pertama yang mengakui sepenuhnya penguasaan barat dan risikonya. Oleh karena itu, beliau berkomitmen untuk menghangatkan dunia Islam terhadap hal tersebut dan melakukan upaya hati-hati untuk melindunginya. Dia menegaskan bahwa umat Islam harus memobilisasi pendukungnya dan berperang di bawah satu bendera. Ia juga berupaya meningkatkan semangat komunitas dan patriotisme di negara-negara Islam.

Jiwa Al-Afghani yang berbasis popularitas menjadi duri di sisi kekuasaan penguasa, sehingga ia tidak banyak berkarya di Istanbul. Namun gagasan ini langsung mendapat sambutan antusias di negara-negara Islam. Sejak saat itu, penganut Islamisme dengan cepat menghilang, terutama setelah Turki Utsmani dan sekutunya Jerman kalah dalam bentrokan besar pertama (Badri, 2014)

Ada kemungkinan bahwa patriotisme yang dimulai di Barat memasuki negara-negara Muslim melalui kontak antara Muslim dan Barat yang menjajah mereka dan dengan cepat terjadi karena banyaknya mahasiswa Muslim yang berkumpul di Eropa atau yayasan pendidikan Barat yang didirikan di negara mereka. Pemikiran silaturahmi ini pada awalnya mendapat banyak kesulitan dari para pionir Islam karena dianggap bertentangan dengan jiwa silaturahmi Islam, namun pada akhirnya berkembang pesat setelah Wadah Islamisme lenyap.

Di berbagai bagian negara Badui, nasionalisme Timur Tengah dirasakan, yang segera menyebar dan menjadi tak terbatas sehingga antusiasme tercermin dalam bahasa yang jelas. (Yulandari, 2020). Hal ini terjadi di Suriah, Mesir, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain dan Kuwait. Ketabahan jiwa Badui juga diperkuat oleh upaya Barat untuk mendirikan Negara Yahudi di tengah-tengah budaya Timur Tengah dan di negara-negara yang banyak memanfaatkan budaya Timur Tengah. Bagaimanapun, negara-negara yang mencerminkan keinginan nasionalisnya bersifat reguler dan mencakup wilayah-wilayah luas yang dipisahkan oleh ekspansionisme Barat. Impian terbentuknya Negara Badui menghadapi persoalan yang luar biasa. Pada tahun 1904, berkembangnya Afiliasi Timur Tengah tidak

berarti bahwa tujuan utama pembentukan negara Badui yang bersatu telah tercapai, namun kemajuan Afiliasi Timur Tengah belum mencapai tujuan utama, terutama karena fakta bahwa mereka menghadapi kekuatan Barat. yang masih belum terungkap di sana

Sementara itu, di India, seperti di Turki dan Mesir, filsafat Islamisme yang dikenal dengan nama kemajuan Khilafah juga mempunyai banyak sekutu. Salah satu pelopornya adalah Syekh Ali Amir pada tahun 1848.14 Meskipun demikian, kemajuan ini segera kabur setelah cucunya berupaya menghidupkan kembali kekhalifahan yang dijatuhkan oleh Kemal. Pasha dalam bahasa Turki sekarang berada di luar jangkauan kemungkinan. Contoh negara-negara muslim Merdeka pascapenjjajahan sebagai berikut:

- a. Libanon Merdeka tahun 1943
- b. Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945
- c. Pakistan Merdeka 15 Agustus 1947
- d. Mesir memperoleh kemerdekaan dari Inggris
- e. Irak Merdeka secara formal tahun 1932 dan rakyat benar benar Merdeka tahun 1958
- f. Yordania Merdeka tahun 1946
- g. Libya Merdeka tahun 1951
- h. Maroko Merdeka 1956
- i. Sudan Merdeka 1956
- j. Malaysia Merdeka 1957
- k. Al Jajai Merdeka 1966

Yang paling luar biasa adalah peningkatan kegembiraan yang terlihat pada partai Kongres Publik India, namun peluang untuk mendapatkan energi positif segera ditinggalkan oleh sebagian besar tokoh Islam karena minoritas Muslim dikalahkan oleh mayoritas Hindu. . Tantangan dalam menyatukan Hindu dan Islam, dua agama penting, perlu diatasi. Oleh karena itu, umat Islam di anak benua India tidak serta merta melekat pada jiwa, padahal di India dikenal dengan istilah komunalisme. Peluang bagi komunalisme Islam diciptakan oleh Mitra Muslim, yang merupakan musuh partai Kongres Umum Hindu. Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) mengemukakan pemikiran ini, yang dianut oleh Iqbal (1876-1938) dan Muhammad Ali Jinnah (1876-1948).

2. Format Kekuasaan Bangsa-Bangsa Islam Pascapenjjajahan

Setelah negara-negara Islam mengalami masa imperialisme oleh negara-negara penjajah. Negara-negara Islam menyatakan kebebasannya masing-masing, selain hal-hal tersebut, setiap bangsa mempunyai gaya atau model pemerintahan yang berkuasa di negaranya. Di negara-negara Muslim, beberapa model atau gaya kekuasaan meliputi:

a. Demokrasi

Pemerintahan mayoritas berasal dari kata demos yang berarti perseorangan dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan. "People rule" atau "pemerintahan oleh rakyat" adalah dua kemungkinan definisi demokrasi (Budiardjo, 2004). Selanjutnya, sistem berbasis suara mengandung arti legislatif dari individu, oleh individu, dan untuk individu dengan menjalankan pedoman yang dibuat oleh individu itu sendiri. Pemerintahan dengan kekuasaan mayoritas lahir dari kehadiran para penguasa di Eropa (zaman lampau) yang percaya bahwa penguasa adalah utusan Tuhan di planet ini, dan memiliki pilihan untuk mengendalikan individu berdasarkan kekuasaan Tuhan. Mereka berharap Tuhan memberi mereka kuasa untuk membuat peraturan dan melaksanakannya. Berdasarkan premis inilah mereka menindas dan mengendalikan individu, sama seperti pemilik budak yang mengendalikan budaknya. Kemudian terjadilah pertempuran antara penguasa Eropa dan sanak saudaranya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat atau dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, seperti wakil-wakil yang dipilih dalam suatu pemilihan umum yang adil, bebas, dan adil. (Abu, 2004).

Menurut Iftitah (Iftitah, 2014), Demokrasi dianggap sesiapa sebagai suatu sistem pemerintahan yang diperlukan oleh dan untuk warga negara jika diamati, namun tidak pernah ada dan tidak pernah ada. Setiap partai demokrasi terkekang oleh standar-standar yang terkekang dari definisi demokrasi itu sendiri. Dengan ini, demokrasi yang sesungguhnya tidak mudanah terkena. Moralitas dikompromikan untuk melengkapi motif miring. Hal ini dicapai melalui penggunaan suatu fungsi. Oleh karena itu, tidak ada penundaan dalam mengakui bahwa kita telah menerapkan sistem yang dikenal sebagai demokrasi, di mana negara ikut serta dan kebijakan pembuatannya. Dalam ranah rapat pemilu, setiap warga negara mempunyai kemampuan untuk mengirimkan pendapatan dengan demikian. Cita-cita "rakyat" (Demos) dalam demokrasi kontemporer dikontraskan dengan cita-cita "wakala", yang berarti "wakil" berarti wakil, sehingga mencegah masuknya kepentingan rakyat ke luar jangkauan satu kelompok kecil. Peredincitim perwakilan yang dipilih dari mayoritas pemilih adalah demokrasi modern. Oleh karena itu. Perwakilan demokrasi adalah persyaratan mendasar dari setiap sistem demokrasi sebenarnya. (Ahmad, 2006).

Pemerintahan mayoritas memerintah adalah jenis negara yang kemudian merasakan keseimbangan mendasar antara masyarakat. Sistem berbasis suara, sebagai "pemerintahan oleh individu, dari individu dan untuk individu, jelas memberi makna bahwa tidak ada pengambilan keputusan kelas dunia. Kekuasaan yang dimiliki oleh kelas dunia adalah kekuasaan yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat (Bahtiar Efendi, 2005)

Salah satu ciri pemerintahan mayoritas adalah kemampuannya untuk menghapuskan bentuk-bentuk kekuasaan langsung, karena absolutisme memicu fasisme. Untuk mengatasi hal tersebut maka dicetuskan gagasan tentang persoalan Trias Legislatif yang dicetuskan oleh seorang sarjana Perancis, Montesquieu. Ide ini dikenal sebagai proporsi terlepas dari apakah suatu negara berbasiskan suara atau tidak. Menurut Trias Politika, kekuasaan negara ada tiga macam, yaitu:

kekuasaan administratif (administrator); kekuasaan utama (pelaksana peraturan); kekuatan hukum (yang menengahi pelanggaran hukum) (Jalil, 2020).

Gagasan buruk tentang Badan Pemerintahan Trias adalah titik fokus pemikiran dalam sistem berbasis suara Barat yang mulai berkembang di Eropa antara abad ke-17 dan ke-11. Pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Sebagaimana dikemukakan Trias Politika, pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa individu merupakan sumber kekuasaan pengatur, pemimpin, dan hukum. Terlebih lagi, masyarakat menentukan standar dan aturan, menentukan juri, dan memilih penguasa. Hal ini memperjelas bahwa tujuan Trias Politika adalah untuk menutup peluang politik yang hilang dari masyarakat karena para spesialis berperilaku tidak konsisten. Oleh karena itu, peluang beragama, peluang penilaian, peluang kepemilikan, dan peluang pemahaman dan praktik merupakan standar peluang yang harus diakui oleh sistem berbasis suara bagi setiap penduduk.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat hambatan-hambatan yang dimiliki oleh berbagai kekuatan ketiga, khususnya kepala, eksekutif administratif dan hukum, terhadap dimulainya kemajuan Islam, khususnya pada masa Nabi dan khulafa Rasyidin, tidak ada batasan antara ketiga kekuatan tersebut (Asgar, 2000). Hal ini karena nabi sebagai pejabat administrasi masih sangat belum jelas. Secara praktis dia adalah kepala, hukum dan administratif. (dengan berpegang teguh pada wahyu Ilahi, pilihan atau kegiatannya sendiri yang disunnahkan oleh umat Islam)

Apalagi pada masa Khulafa'Rasyidin, mereka masih belum bergabung ketika ada titik-titik batas yang harus dikendalikan. khususnya kepala, eksekutif hukum dan regulator. Tentu saja, berbeda dengan forum demokrasi saat ini, masa jabatan tidak ditentukan. Ini adalah keputusan politik seumur hidup dengan kekuasaan yang tidak jelas. Namun, ketika Abu Bakar menerima kekhalifahan, dia berkata: Wahai manusia, aku diangkat menjadi penguasa di antara kamu dan aku tidak takut padamu. Maka jika saya berbuat baik, membantu saya, dan menganggap saya melenceng, maka saya akan dikecam." (Asgar, 2000).

Republik Indonesia yang bergantung pada peraturan (rechtsstaat), bukan dalam pandangan kekuasaan sederhana (machtsstaat), pemerintahan dalam kerangka sakral (peraturan fundamental) dan bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Membaca penjelasan. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya semua yang berkaitan dengan pemerintahan hendaknya dikoordinasikan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan (Firdaus, 2021)

b. Kerajaan atau Monarki

Gagasan buruk tentang Badan Pemerintahan Trias adalah titik fokus pemikiran dalam sistem berbasis suara Barat sudah mulai berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 dan ke-11. Pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Sebagaimana dikemukakan Trias Politika, pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa individu merupakan sumber kekuasaan pengatur, pemimpin, dan hukum. Terlebih lagi, masyarakat menentukan standar dan aturan, menentukan juri, dan memilih penguasa. Hal ini memperjelas bahwa tujuan Trias Politika adalah untuk menutup peluang politik yang hilang dari masyarakat karena para spesialis berperilaku tidak konsisten. Oleh karena itu, peluang beragama, peluang penilaian, peluang kepemilikan, dan peluang pemahaman dan praktik merupakan standar peluang yang harus diakui oleh sistem berbasis suara bagi setiap penduduk.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat hambatan-hambatan yang dimiliki oleh berbagai kekuatan ketiga, khususnya kepala, eksekutif administratif dan hukum, terhadap dimulainya kemajuan Islam, khususnya pada masa Nabi dan khulafa Rasyidin, tidak ada batasan antara ketiga kekuatan tersebut (Asgar, 2000). Hal ini karena nabi sebagai pejabat administrasi masih sangat belum jelas. Secara praktis dia adalah kepala, hukum dan administratif dengan berpegang teguh pada wahyu Ilahi, pilihan atau kegiatannya sendiri yang disunnahkan oleh umat Islam.

Apalagi pada masa Khulafa'Rasyidin, mereka masih belum bergabung ketika ada titik-titik batas yang harus dikendalikan. khususnya kepala, eksekutif hukum dan regulator. Hanya saja, ketika Abu Bakar mengakui tampuk pemerintahan, hal itu merupakan hasil kesepakatan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Tentu saja, berbeda dengan forum demokrasi saat ini, masa jabatan tidak ditentukan. Ini adalah keputusan politik seumur hidup dengan kekuasaan yang tidak jelas. Namun, ketika Abu Bakar menerima kekhalifahan, dia berkata: Wahai manusia, aku diangkat menjadi penguasa di antara kamu dan aku tidak takut padamu. Maka jika saya berbuat baik, membantu saya, dan menganggap saya melenceng, maka saya akan dikecam." (Asgar, 2000).

Republik Indonesia yang bergantung pada peraturan (rechtsstaat), bukan dalam pandangan kekuasaan sederhana (machtsstaat), pemerintahan dalam kerangka sakral (peraturan fundamental) dan bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Membaca penjelasan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan hendaknya diarahkan oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Firdaus, 2021)

c. Demokrasi Islam

Konfigurasi kekuatan di negara dengan pemerintahan berbasis popularitas Islam merupakan filosofi politik kekuasaan mayoritas yang mencoba menerapkan standar Islam pada strategi publik dalam sistem berbasis suara. Menurut teori politik Islam, demokrasi Islam mempunyai tiga ciri mendasar: pionir harus dipilih oleh individu, bergantung pada syariah, dan fokus pada latihan "syura", suatu jenis diskusi unik yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditelusuri dalam berbagai cara. hadits dengan jaringannya. Iran dan Malaysia adalah dua contoh negara yang menunjukkan tiga karakteristik mendasar tersebut. Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, dan Majelis UEA adalah contoh negara-negara yang tidak berpegang pada standar berbasis suara Islam meskipun mereka adalah negara Islam, karena negara-negara tersebut tidak menyelenggarakan pemilu.

Penerapan pemerintahan mayoritas Islam berbeda di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, dengan alasan bahwa penerjemahan syariah berfluktuasi dari sebuah negara sampai pada negara lain, dan penerapan syariah lebih menyeluruh pada negara-negara yang di mana syariah menjadi alasannya. peraturan negara. Di negara-negara tersebut

terdapat aliansi atau perkembangan Islam yang progresif, misalnya di Bangladesh terdapat Jamaat-e Islami Bangladesh Development (Weeramantry, 1997)

3. Ketergantungan Bangsa Muslim Kepada Negara Lain

Pada tanggal 25 September 1969, sekelompok pemimpin dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mendirikan Organisasi Kerjasama Islam (Organisasi Kerjasama Islam, *Munazhzhamah al-Ta'âwun al-Islâmî*). Organisasi ini didirikan di Rabat, Maroko, dengan tujuan menyatukan negara-negara Muslim dan berkolaborasi untuk kemajuan dan pembelaan hak-hak mereka (Asari, 2019). Dengan demikian terjadinya Kerjasama berbagai negara muslim memunculkan ketergantungan dan sifat ketergantungan ini sama seperti mata pisau yang memiliki arah positif dan negatif. Dalam hal ini ketergantungan negara muslim meliputi dari berbagai bidang yaitu bidang politik, militer, ekonomi, budaya, intelektual.

a. Politik

Politik internasional merupakan satu wujud belaka yang melakukan dialog atau hubungan di tingkat internasional. Politik di tingkat internasional adalah pemeriksaan terhadap negara dan distribusi kekuasaan politik di antara organisasi-organisasi internasional; fokus utamanya adalah diplomasi dan pertukaran ide antar negara dan entitas politik lainnya. Politik internasional, berbeda dengan politik dalam negeri, terdiri dari hambatan-hambatan dalam mencapai saling pengertian dan konflik, keterbatasan waktu dan dukungan, legislasi dan peraturan. Negara rata-rata mengenai perbedaan musuh dan sekutu. Kebijakan internasional mengamanatkan bahwa suatu negara tertentu memikul tanggung jawab atas tindakan negara lain. Pristikot internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau merupakan secara sederhana.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi akhirnya mencapai kesimpulan. Arab Saudi Arabia, atas nama umat Islam, menunaikan ibadah dan umrah atas nama umat Islam di Indonesia. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia adalah negara bebas Muslim, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. Kebuntuan antara Arab Saudi dan diplomasi Indonesia belum berakhir; ini ditegaskan pada hari terakhir kalender Islam. Berasal dari hubungan antar pedagang Arab dengan berdagang dan menyebarkan agama Islam, keberadaan Islam melalui penduku Indonesia terhadap pengaruh besar (Shaleh, 2007).

b. Ekonomi

Menurut George (George, 1999), kerjasama ekonomi menggunakan setiap negara terhadap setiap negara terhadap ekonomi, karena tidak adanya negara di dunia ini dapat mengisolasi diri dari kerjasama dengan negara lain. Syarat sensitif adalah saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Hal ini pernah dibahas dalam buku Adam Smith "The Wealth of Nations" dalam kaitannya dengan teori kekayaan absolut.

Terkait investasi, Indonesia dan Arab Saudi saling berbagi kerja, terbukti dengan kunjungan Arab Saudi ke Arab Saudi pada tahun 2030 sebagai bagian dari agenda Foreign Direct Investment (FDI), dimana Indonesia ditetapkan sebagai penerima investasi tunggal. objektif. Fenomena ini muncul dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Sianturi, 2017).

c. Militer

Kerja sama militer adalah kolaborasi yang melibatkan kolaborasi yang tetap dan mempertimbangkan bila dua kekuatan melalui kesamaan keamanan. Kerja internasional, disebut juga diplomasi pertahanan, merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD, peraturan-undangan, kebijakan, dan strategi pertahanan tahun 1945. Kerja sama internasional di bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan merupakan bagian dari Indonesia (Parulian, 2013).

Oleh karena itu, ketegangan antara Beijing dan Indonesia dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kerja baik dari bidang sosial, ekonomi, dan militer. Pada hari itu, pemerintahan kedua negara tetap kooperatif, kooperatif, dan saling mendukung. Namun pada periode-periode berikutnya, hubungan tersebut mengalami transformasi menjadi hubungan yang perlu dikoreksi, dikoreksi, dan ketidakramahan. Sifat hubungan kedua negara mungkin dapat mengalami perubahan yang cepat dan signifikan dalam waktu yang lama. Indonesia tidak memiliki hubungan yang mengatur wilayah pulau-pulau dengan Beijing di Liga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (LCS), kecuali Filipina, Malaysia, dan Brunei yang merupakan negara anggota ASEAN. Indonesia berulang kali menampilkan dirinya sebagai "mediator" untuk mencapai resolusi damai. Indonesia saat ini berperan sebagai mediator antara negara-negara anggota ASEAN yang terpecah dalam garis suksesi sehubungan dengan Deklarasi Perjanjian Perdamaian dan Keamanan Cina Selatan.

d. Budaya

Diplomasi melalui bidang kebudayaan lebih efektif daripada menggunakan kekuatan militer karena menciptakan kesan harmonis tanpa menekan pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi budaya disebut juga dengan diplomasi aktor non-negara, karena tujuannya adalah menumbuhkan kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan simpati dan kesan positif. Diplomasi budaya memfasilitasi hubungan yang terjalin secara damai dan non-kekerasan melalui pendekatan kebudayaan dan pertukaran nilai-nilai gagasan dalam budaya masing-masing (Nuraini, 2017).

Misalnya, The Japan Foundation adalah organisasi yang mengawasi kerja sama budaya dan beroperasi di banyak kawasan di Asia Pasifik, Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Peran The Japan Foundation adalah menjaga keharmonisan hubungan kebijakan diplomasi, khususnya di bidang kebudayaan. Jepang yang masih menjunjung tinggi tradisi semangat pejuang dikenal dengan sebutan "Bushido". Hakikat ajaran ini adalah menumbuhkan ketenangan batin, seperti kesetiaan, kesederhanaan, ketekunan, dan semangat belajar. Semangat tersebut masih tetap dilestarikan bahkan menjadi tradisi etos kerja di Jepang, meski sudah memasuki era kekinian.

e. Intelektual dan Pendidikan

Program bantuan luar negeri Pemerintah Australia diam-diam telah meratifikasi standar hidup jutaan orang di negara berkembang. Program bantuan tersebut membangun kepentingan nasional Australia melalui kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan memberikan kemiskinan pada negara penerima manfaat. Australia mengalokasikan dana ke wilayah-wilayah yang sedikit memerlukan dan menegaskan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang efisien dan efektif.

Pemerintah Australia bekerjasama dengan pemerintah asing dalam rangka mengembangkan strategi dan melaksanakan program bantuan; hal ini disebut sebagai “kemanusiaan yang bertanggung jawab”. Deputi tersebut melibatkan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, dengan peningkatan infrastruktur dan tata kelola ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan standar kesehatan dan pendidikan, melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan, demokrasi, keadilan, dan tata kelola yang baik. (Bily, 2014)

4. Tantangan dan Hambatan Demokrasi di Dunia Islam

Sebagaimana diungkapkan Sandra Halperin dalam (Ali, 2016) Runtuhnya kerangka kelas konvensional, bangkitnya rata-rata komparatif dengan berbagai kelas, meluasnya kerangka wirausaha, dan bangkitnya negara-negara merupakan sebagian dari kondisi tersebut. yang mengarah pada perbaikan sistem aturan mayoritas. tumbuh dan berkoordinasi secara lokal, dan meningkatkan kekuatan pembeli lokal. pasar dan demokrasi yang menyertainya. Pertumbuhan pasar domestik berbasis ekonomi dan langkah-langkah redistribusi mempunyai kaitan erat.

Dari bantuan tersebut, tentu saja kemajuan sebagian besar pemerintahan di suatu negara bisa terhambat jika tidak ada. Pertama, demokratisasi pada umumnya menyebabkan kehancuran demokratis atas struktur kelas konvensional; Namun hal ini tidak berlaku di Timur Tengah. Terlepas dari banyaknya kemajuan dalam hal peluang, perjuangan, dan perlawanan di distrik Timur Tengah, rencana sosial tetap hadir dan kompeten. Secara umum, munculnya negara-negara moderat di distrik Timur Tengah telah mengubah perkembangan politik di wilayah tersebut; Perkembangan sosial yang meningkat selama pemerintahan Ottoman berlanjut hingga perbaikan struktur negara yang maju. Situasi yang sedang berlangsung menunjukkan pentingnya pemilik tanah dalam mengendalikan pembangunan sosio-sosial di Timur Tengah untuk mengoordinasikan penggunaan lokal. Banyak gerakan yang dimulai untuk mengikuti kerangka sosial dan politik menunjukkan hal ini. Untuk instansi. dengan memusnahkan kelompok asing dan kelompok minoritas yang mempunyai peran sebagai pionir dalam perekonomian. perbankan, industri dan panggilan lain, kemajuan industri dan bisnis lingkungan. Ini ditemukan oleh asosiasi penciptaan di Mesir, Suriah dan Irak pada tahun 1950an. Yordania dan Lebanon berusaha untuk membedakan perekonomian mereka karena pembatasan yang dipaksakan oleh kelompok pengambil keputusan tertinggi. (Halperin, 2005).

Kedua, para pembuat undang-undang yang bersifat diktator, umumnya patriot dan konservatif, dan yang menyusun isu-isu pemerintahan konvensional berdasarkan agama dan memusuhi imperialisme, benar-benar memberikan komentar negatif terhadap rata-rata pekerja. Ada tekanan pada asosiasi sosialis yang mendukung pembentukan rancangan industrialisasi, penerapan penilaian pajak yang moderat, dan perubahan tempat tinggal serta pemerintahan mayoritas politik. Dapat dikatakan bahwa pengembangan spesialis sangat tidak signifikan dan dikontrol secara ketat oleh otoritas publik dalam setiap kelas angkatan kerja (Halperin, 2005).

Ketiga, kerangka kewirausahaan yang digariskan oleh kemajuan terkini serta sektor usaha terbuka tidak dapat diterapkan seperti yang diantisipasi di Timur Tengah. (Nur, 2019) Pemilik tanah serta pengangkut ketika ini mengendalikan sebagian besar perekonomian negara; sang sebab itu, tidak ada lapisan moneter yg meningkat untuk menantang kekuasaan mereka. misalnya saja industri bensin yang beroperasi di negara-negara maju, khususnya Arab Saudi. daerah ini hanya mempekerjakan sebagian kecil asal angkatan kerja negara, dan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian serta organisasi. Meskipun mempekerjakan lebih dari 40% angkatan kerja Dari tahun 1980, agribisnis bisa menyumbangkan 7,6% pendapatan negara. (Halperin, 2005)

(Firdaus, 2011) Kehadiran afiliasi Islam konvensional, yang sebagai alasan buat melindungi Timur Tengah berasal komunisme dan beban, merupakan bukti kekuatan besar kontrol yang terkait erat menggunakan sifat Islam. Hal ini merupakan satu lagi komponen yg membentuk pengembangan lebih lanjut kerangka kerja berbasis suara menjadi sebuah ujian di negara-negara Timur Tengah. Landasan Islam sebagai agama awam negara-negara pada Timur Tengah yg terpisah berasal Lebanon adalah menggambarkan bahwa hukum Islam pada wilayah tersebut. menjadi agama negara, Islam poly berkaitan menggunakan dampak para pemilik tanah kaya serta elit yg perlu menjaga yayasan sosial permanen berjalan. Halperin, 2005)

Karena kemungkinan terjadinya masalah-masalah sosial yang berlebihan ini, negara-negara belum mampu melakukan perubahan moneter dan politik sepenuhnya, yang telah memberdayakan semakin banyak kelompok Islam revolusioner untuk mengambil bagian dalam masalah-masalah administratif di Timur Tengah. Peningkatan Kemitraan Muslim merupakan upaya vokal dalam hal ini.

KESIMPULAN

Faktor berkembangnya suatu negara dan negara Islam tidak lepas dari usaha dan perjuangan para legenda negara tersebut dalam menduduki puncak kekuasaan di masa itu serta beberapa unsur dari keterbiasaan suatu negara untuk bebas dalam menjalankan pemerintahan publiknya. Beberapa negara Islam tingkat tinggi dengan sistem pemerintahannya umumnya bekerja sama dengan masing-masing negara Islam di berbagai bidang yang membantu kelangsungan negaranya.

Islam dan sistem berbasis suara merupakan dua topik atau pembahasan yang berkaitan. Namun ada beberapa anggapan yang tidak memperhitungkan fakta bahwa agama Islam tidak bergantung pada Allah SWT dan mayoritas pemerintahan didasarkan pada sudut pandang seseorang, sedangkan sistem pemerintahan sebagian besar terkait dengan Islam. Namun, ada juga orang yang melihat kemungkinan sistem berbasis suara karena sebagian besar mengontrol pemerintah dan mengatur kegiatan publik dan kegiatan lainnya. Bagaimanapun, pemerintahan yang didominasi mayoritas belum mengalami kemajuan pesat atau bahkan tidak mengalami kemajuan apa pun di negara-negara tertentu. Salah satunya adalah Timur Tengah. Pemerintah tidak mampu melaksanakan reformasi ekonomi dan politik karena sifat kelompok-kelompok ekstremis ini, yang selanjutnya mendorong banyak kelompok Islam ekstremis untuk berpartisipasi dalam politik Arab. Peningkatan Organisasi Muslim adalah upaya vokal dalam cara seperti itu. Hasan Albana, pendirinya, diangkat pada tahun 1928 dan memasuki dunia politik pada tahun 1936.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang telah memberikan doa dan semangat kepada kami untuk tetap memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan melalui tulisan-tulisan ilmiah seperti ini. Dan tak lupa ucapan terimakasih juga kepada dosen dan teman-teman yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini sehingga atikel ini dapat selesai dan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan kami menyadari bahwa tulisan artikel ini tentu memiliki kekurangan dan oleh sebab itu harapan kami kepada pembaca untuk mengembangkan artikel ini agar lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Abdulkadir Kurdi, (2000) *The Islamic of State A Study on the Islamic Holy in Constitution* diterjemhkan daripada Ilzamuddin Ma'mur dengan tema Tatanan Sosial dalam Studi islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah , Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Abdul, J. (n.d.). *Kompatibilitas Islam dan Demokrasi : Tantangan dan Hambatan*. Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keamanan.
- Ahmad, V. (2006). *Agama Politik Nalar Politik Islam Alih Bahasa Ali Syahab*. Jakarta, Citra Gaya Chicago
- Ali, M. (2016). *Islam serta Demokrasi dari Kajian Fiqih Siyasah Tentang Tantangan serta Hambatan Demokrasi Di Dunia Islam*. Jurnal AlAshiriyah
- Asari Hasan,(2019), *Sejarah Islam yang Modern Agama dalam Negosiasi Historis pada Abad XIX*, Medan, Perdana Publishing
- Asgar Ali Engineer, (2000) *Islamic State diterjemahkan daripada Imam Mutaqin dengan judul Devolusi dari Negara Islam*,Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Asongko, (2013) *Catur serta Parulian, Safrida Rumondang*. Anggaran. Jakarta: Salemba
- Badri Yatim, (2014), *Sejarah dari Peradaban Islam*. Ed.1, Cet. 25; Jakarta: Rajawali Pres,
- Billy Anggar, 2014, *Dampak dari Kerjasama Indonesia dan Australia: dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Sister in the School Smpn1 Tasikmalaya Dengan Glenunga of International High School Australia) 2012*, Jom FISIP, Vol 1, No, 2
- Budiarjo,Miriam,(2004), *Dasar –dasar dari Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Effendy, Bachtiar. (2005) *Jalan Tengah dalam Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi serta Negara yang Tidak Mudah*. Ushul Press, Jakarta
- Esse Indo, (2021), *Sistem Pemerintahan dari Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad Xv-Xvii Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Siyasahtuna, Vol. 2 No. 1
- Firdaus, (2021), *Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Kajian Hukum Tata Negara* Yogyakarta, Kalimedia
- Halperin, S. (2005). *he Post-Cold of War Political Topography in the Middle East: Prospects For Democracy*.
- Iftitah, N. R. (2014). *Islam dan Demokrasi*. Islamuna: Jurnal Studi Islam
- Jalil Abdul, (2020), *Kompatibilitas Islam serta Demokrasi: Tantangan serta Hambatan Demokratisasi Dalam Dunia Islam*, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No.
- Mumtaz Ahmad (ed), (1993) *States Politik and Islam yang diterjemahkan oleh Ena Nadi dengan tema Masalah-Masalah dari Teori Politik Islam* Cet. I; Bandung: Mizan,
- Nur, S. M. (2019). *Demokrasi serta Tantangannya Dalam sebuah Bingkai Pluralisme Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.
- Nuraini, (2017). *Diplomasi kebudayaan Jepang dalam pandangan Indonesia Dalam Mengembangkan bahasa Jepang*. Journal Fisip Unri, Vol. 4 No. 2
- Putuhena Shaleh. (2007). *Historiografi Haji di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Richard, M. K. (2004). *Demokrasi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Niagra,
- Weeramantry, Christopher G. (1997). *Justice Without in Frontiers: Furthering of the Human Rights*. The Hague: Kluwer Law International.
- Yulandari, Teri. *Sejarah pemikiran dari Abdul Rahman Baswedan tentang Nasionalisme Tahun 1908–1986*, Diss. UIN Sunan Ampel S